BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini negara banyak mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan pembangunan disegala bidang, dan salah satu dana yang menjadi andalannya adalah pajak.

Perayuran peundang-undangan perpajakan yang mengatur ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Yang kemudian diubah dengan UU No.9 tahun 1994, yang kemudian menjalani perubahan kembali yaitu dengan ditetapkan nya UU No.16 tahun 2000, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakn sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang sebagian besar memuat ketentuan umum dan tatacara pajak penghasilan, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Dalam PPh pasal 21, setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan seperti pegawai, karyawan / karyawati, baik tetap maupun lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, serta penerima upah duwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik langsung karena digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pembayaran pajak penghasilan ini bisa dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak di tempat wajib pajak bekerja meliputi tempat tinggal pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

System perpajakan di Indonesia menganut system *SELF ASSEMENT*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui system berhitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan pungsinya kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 ini tentu akan berjalan lancar apabila ada tanggung jawab dan kesadaran dari wajib pajak atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak. Pada dasarnya setiap orang yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lainnya yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak disarankan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, kata disarankan disini dimaksudkan bahwa setiap orang tidak harus memiliki NPWP sendiri, karena pembayaran pajak bisa dilaksanakan tanpa menunjukan bukti kepemiliken kartu NPWP, khususnya bagi karyawan yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Untuk wajib pajak yang ingin memiliki NPWP harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, karena NPWP berpungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan juga sebagai identitas wajib pajak, yang selanjutnya dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setelah NPWP terdaftar, maka akan terbit surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka untuk penulisan laporan ini, penulis memilki judul " Prosedur Pemeriksaan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung – Tegallega.

1.2 Maksud danTujuan Pelaksanaan Kerja Praktek

Sesuai dengan kurikulum program sarjana (S1) jurusan manjemen informatika, yang menjadi tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah :

1) Untuk penulis dapat menerapkan ilmu yang ada dalam perkuliahan.
2) Sebagai studi perbandingan antara teori yang ada dalam mata kuliah dengan kenyataan di lapangan.
3) Bagi perusahaan pelaksanaan kerja praktek, diharapkan dapat berguna dalam pengembangan, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan teknis dengan cara simulasi alternatif pemecahan sesuai dengan ilmu yang didapat mahasiswa serta kemampuan menginterprestasikan masalah yang dihadapi.
4) Dapat memperluas ilmu dan pengalaman, serta interaksi antara lapisan masyarakat tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3 Metode Kerja Praktek

Penulis berusaha mencari dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk diproses menjadi sebuah informasi yang berguna dalam penyusunan laporan kerja praktek. Metode kerja praktek yang penulis gunakan dalam membantu penyusunan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Studi Lapangan (*Field Study*)

Adalah terjun langsung ke lapangan dengan cara *supervis*, dan melakukan pengumpulan data yang diteliti dengan proses penyusunan laporan kerja praktek.

Bentuk-bentuk penelitian studi lapangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi (*Observation*)

   Melakukan pencatatan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen, khususnya pada seksi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 selama kurang lebih satu bulan pada saat melaksanakan kerja praktek.

2. Wawancara (*Interview*)

   Menanyakan secara langsung kepada pegawai, pelaksana dan pejabat yang berwenang, yang dapat membantu memberi keterangan-keterangan yang diperlukan.

1.3.2 Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Adalah pencarian data melalui media buku-buku yang berhubungan dengan materi penataan arsip. Buku-buku tersebut berasal dari kantor Pelayanan Pajak Bandung – Tegalleg, serta sumber-sumber lainnya yang tidak bisa dituliskan satu per satu.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Tegallega, yang berlokasi di jl.Soekarno-Hatta No.216 Bandung, dimana penulis ditempatkan dpada seksi Penerimaan dan Keberatan.

Pelaksanaan kerja praktek tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 25 September 2003.

Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Tegallega adalah :

1. Hari Senin – Kamis

   Masuk mulai pukul 08-00 WIB sedangkan pulangnya pukul 12-00

2. Hari Jum'at

   Masuk mulai pukul 07-00 WIB, terlebih dahulu melaksanakan senam kesegaran jasmani selama kurang lebih 60 menit (1 jam) mulai dari 07-00sampai dengan 08-00, sedangkan pulangnya pada pukul 17-00dengan istirahat dari mulai pukul 11-30 sampai dengan 13-15 WIB.



5. Sistematika Penulisan laporan Kerja Praktek

Dalam penyelesaian laporan ini, penulis melakukan pembahasan Bab demi Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan informasi mengenai : latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi kerja praktek, lokasi dan waktu, serta sistematika penulisan dari laporan kerja praktek yang berisi ringkasan isi per Bab yang ada dalam laporan kerja praktek.

BAB II : Landasan Teori

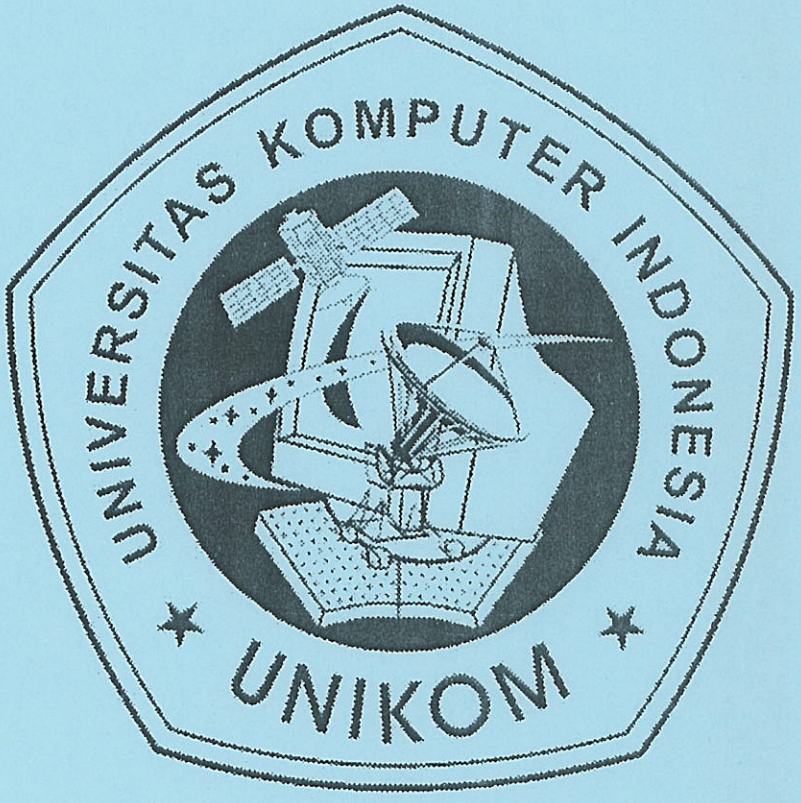
Landasan teori ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai pendekatan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi. Bab ini membahas konsep dasar tentang bidang pelaksanaan kerja praktek, serta teknis pelaksanaan Kerja Praktek.

BAB III :

Dalam Bab ini membahas tentang konsep-konsep dasar mengenai Perusahaan Tempat Kerja Praktekserta hal-hal yang dilakukan dalam Kerja Praktek.

BAB IV :

Bab terakhir ini membahas mengenai hal-hal yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pihak Perusahaan Tempat Kerja Praktek.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM